

## Alternatif Pengembangan Kecamatan Sape Sebagai Pusat Kegiatan Di Bagian Timur Kabupaten Bima, NTB

Siti Fatimah Azzahra<sup>1</sup>, Samsul Ma'rif<sup>2</sup>

Diterima : 29 September 2016

Disetujui : 8 Desember 2016

### ABSTRACT

Since the reign of Bima district split into two autonomous regions that become Bima and Bima City, the issue of the transfer of the district capital began to sound so as to make a few districts in Bima start to straighten the sake elected to the district capital. One of them is the District of Sape. District Sape, a district that has a lot of potential, location of districts Sape is located in the eastern part of the district of Bima make it as a gateway economy either from or to a province adjacent namely NTT, besides the presence of the port sape straits sape as a transportation hub of and to the Bima-Labuan Bajo East Nusa Tenggara province, making it the heart activity activity Center to provincial or national. From many of the above considerations may be raised several alternative selected as appropriate for the development of districts Sape. With the method used is descriptive Qualitative analysis assisted by hirarchi analytical analysis process (AHP), which involves several sources related to show that the alternative selected is District Sape used as a new autonomous region (DOB).

**Keywords :** Regional Development, Alternative, Activity Center, District Sape, Bima

### ABSTRAK

Sejak pemerintahan kabupaten Bima di pecah menjadi dua daerah otonomi yaitu menjadi Kabupaten Bima dan Kota Bima, isu pemindahan ibu kota kabupaten mulai terdengar sehingga membuat beberapa kecamatan di Kabupaten Bima mulai berbenah demi terpilih menjadi ibu kota Kabupaten. Salah satunya adalah Kecamatan Sape. Kecamatan Sape, merupakan kecamatan yang memiliki banyak sekali potensi, Letak kecamatan Sape yang berada di bagian timur kabupaten Bima menjadikannya sebagai pintu gerbang perkonomian baik dari ataupun ke provinsi yang bersebelahan yaitu Provinsi NTT, selain itu keberadaan pelabuhan sape di selat sape sebagai jalur transportasi laut dari dan menuju Bima-Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadikannya sebagai jantung kegiatan Pusat Kegiatan propinsi ataupun Nasional. Dari banyaknya pertimbangan di atas bisa jadi akan memunculkan beberapa alternative terpilih yang sesuai untuk pengembangan kecamatan Sape. Dengan metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan dibantu dengan analisis analytical hirarchi process(AHP) yang melibatkan beberapa narasumber yang terkait memperlihatkan bahwa alternatif terpilih adalah Kecamatan Sape dijadikan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

**Kata Kunci :** Pengembangan Wilayah, Alternatif, Pusat Kegiatan, Kecamatan Sape, Bima

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
Kontak Penulis : Email : ifatrah91@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah administrasi sekaligus pusat kegiatan provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di sebelah timur provinsi ini. Kabupaten Bima adalah daerah yang memiliki banyak sekali potensi disetiap kecamatannya sehingga dapat dimungkinkan ada beberapa titik pusat kegiatan yang dapat dikembangkan. Pusat kegiatan pengembangan yang dimaksud adalah agrobisnis perikanan, daerah tujuan wisata serta pintu utama pelabuhan penumpang di pulau Sumbawa bagian timur baik melalui udara ataupun laut. Permasalahan mulai muncul pada tahun 2010 sejak pemerintahan kabupaten Bima dipecah menjadi dua daerah otonomi yaitu menjadi Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Isu pemindahan ibu kota kabupaten mulai terdengar sehingga membuat beberapa kecamatan di Kabupaten Bima mulai berbenah demi terpilih menjadi ibukota Kabupaten. Ada beberapa opsi yang disarankan untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bima salah satunya adalah Kecamatan Sape yang lokasinya berada di sebelah timur Kabupaten Bima. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan lama dan akhirnya ditetapkan bahwa ibukota pemerintahan Kabupaten Bima berada di Kecamatan Woha. Alasan yang tidak mendukung bahwa dengan penempatan ibukota kabupaten di Kecamatan Woha akan menimbulkan kesenjangan antara Bima bagian Tengah, Utara, Timur dan Selatan.

Kecamatan Sape yang sempat menjadi kandidat Ibukota pemerintahan Bima yang baru merupakan kecamatan yang memiliki banyak sekali potensi letak Kecamatan Sape yang berada di bagian timur kabupaten Bima menjadikannya sebagai pintu gerbang perekonomian. Selain itu keberadaan pelabuhan Kecamatan Sape di selat Kecamatan Sape sebagai jalur transportasi laut dari dan menuju Bima-Labuhan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijadikan sebagai jantung kegiatan Pusat Kegiatan Provinsi ataupun Nasional. Selain itu, potensi Agroindustri dan Agrobisnis dalam hal perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan di Kecamatan ini.

Dengan melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Bima bagian timur yang dalam hal ini bukan hanya Kecamatan Sape saja, apabila tidak dikembangkan secara baik ketika telah ditetapkannya ibukota kabupaten kearah barat, ditakutkan implikasinya adalah terjadinya rentang kendali yang tidak baik akibat dari pemindahan ibukota terhadap pertumbuhan Bima bagian timur. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar wilayah Bima bagian barat maupun Kecamatan Sape ke wilayah timur (Labuhan Bajo) karena pada dasarnya pola aktifitas dan perkembangan antara Kecamatan Sape dan Labuhan Bajo, NTT adalah sama sehingga tidak jarang kedua wilayah ini sering dikatakan sebagai Kota kembar

Adapun beberapa alternatif yang diberikan untuk pengembangan Kecamatan Sape adalah :

1. Dimekarkan menjadi Kabupaten baru dan Kecamatan Sape sebagai Ibukota Kabupaten
2. Dijadikan sebagai pusat pertumbuhan Bima Timur dilihat dari pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat.
3. Difokuskan menjadi Kawasan Strategis Ekonomi

## KAJIAN LITERATUR

### Strategi pengembangan pusat pertumbuhan

Menurut Parr (1999), ada beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan ini, yaitu :

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (depressed area)
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah
3. Memodifikasi sistem kota
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah

Perkembangan pusat pertumbuhan disuatu wilayah ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sumberdaya Alam
2. Sumberdaya Manusia
3. Kondisi Fisiografi/Lokasi
4. Fasilitas penunjang

### Alternatif Pengembangan Kelembagaan

Menurut Rustiadi et al. (2008) kelembagaan sebagai aturan main dan organisasi berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata serta berkelanjutan. Langkah awal guna mencapai efisiensi dalam alokasi sumberdaya yang optimal adalah perlunya pembagian pekerjaan (division of labor). Peningkatan pembagian pekerjaan akan mengarah kepada spesialisasi ekonomi sedangkan spesialisasi yang berlanjut akan mengarah kepada peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi.

### Kelembagaan sesuai dengan wilayah administrasi

Penggunaan wilayah administratif disebabkan oleh dua faktor, yakni berdasarkan satuan administratif dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah serta wilayah didasarkan pada satuan administrasi pemerintahan untuk mempermudah analisis dalam pengumpulan data diberbagai bagian wilayah.

### Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut peraturan pemerintah bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah itu mencakup aspek Pemerintahan, aspek Pembangunan, dan aspek Kemasyarakatan. Dalam Harefa (2013), aspek Pemerintahan meliputi bidang politik, pertahanan dan keamanan, peraturan daerah, efektifitas pengelolaan pembangunan, peningkatan kelembagaan atau organisasi, perencanaan dan penataan ruang. Aspek Pembangunan meliputi peningkatan pelayanan public, pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan ekonomi daerah. Aspek Kemasyarakatan meliputi pertumbuhan penduduk, partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi sumberdaya manusia.

### **Pembentukan Daerah**

secara khusus, Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan kawasan khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

### **Pemekaran Wilayah**

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (poerwadarminta, 2005). Jadi dengan demikian daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, pemekaran daerah atau wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode survey Deskriptif, dengan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk alternatif bentuk pengembangan wilayah. Alternatif bentuk kelembagaan ini kemudian ditanyakan secara persepsional pada narasumber yang dianggap representatif dan mengetahui perkembangan pembangunan di wilayah studi.

## **TEKNIK ANALISIS**

### **Analisis Kriteria Alternatif**

Sebelum dilakukan analisis menggunakan metode AHP, hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan kriteria setiap alternatif terpilih. Setelah ditentukan kriteria dari setiap opsi alternatif, perlu dilakukan analisis awal untuk mengetahui terpenuhi atau tidak dengan kriteria atau syarat yang ada, setelah hasil ditemukan maka selanjutnya akan dilakukan kritikal analisis untuk melihat dari ketiga alternatif yang ditentukan, mana yang sesuai untuk dikembangkan di Kecamatan Sape.

### **Analitycal Hierarchy Process (AHP)**

Penggunaan metode AHP yang berbasis komputer (Expert Choice), dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi narasumber tentang alternatif bentuk pengembangan Kecamatan Sape yang dilihat dari perspektif UU No 23 Tahun 2014. Persepsi narasumber dalam hal ini dieksplorasikan dari pemahaman mereka tentang

kondisi perkembangan wilayah studi, khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat.

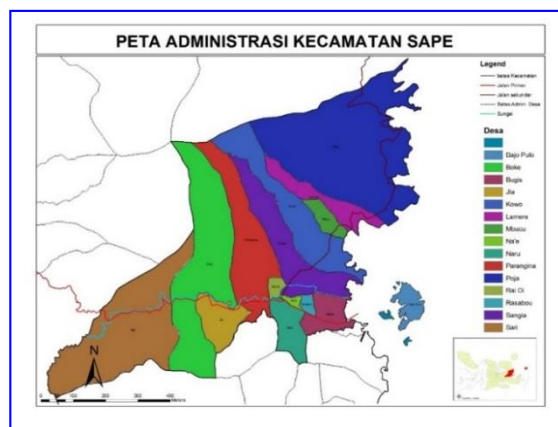
Didalam penelitian ini, ada beberapa stakeholder yang dijadikan sebagai tokoh atau orang-orang yang tepat untuk diwawancarai guna memperoleh informasi yang akurat. Sedangkan stakeholder disini adalah pihak atau para pakar yang mengetahui permasalahan atau tema yang diangkat peneliti.

### Analisis Kesiapan

Analisis kesiapan ini dilakukan untuk melihat seberapa siapnya kecamatan Sape dalam mempersiapkan diri sebagai sebuah kota pusat pertumbuhan yang menopang jalannya perekonomian dan pembangunan di kabupaten Bima, khususnya di Bima bagian timur. Kecamatan Sape memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dan lengkap dalam usaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya. Sape pun memiliki sektor unggulan yang cukup potensial, baik dalam bidang perikanan & kelautan, pertanian dan juga pariwisata.

### GAMBARAN UMUM

Kecamatan Sape merupakan kecamatan yang memiliki banyak sekali potensi, dengan jumlah penduduk terbesar pertama di kabupaten Bima, menjadikan salah satu indikator untuk menjadikannya sebagai pusat kegiatan di kawasan Bima bagian timur. Letak kecamatan Sape yang berada di bagian timur kabupaten Bima menjadikannya sebagai pintu gerbang perekonomian baik dari ataupun ke provinsi yang bersebelahan yaitu Provinsi NTT, selain itu keberadaan pelabuhan sape di selat sape sebagai jalur transportasi laut dari dan menuju Bima-Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadikannya sebagai jantung kegiatan Pusat Kegiatan propinsi ataupun Nasional. Selain itu, potensi Agroindustri dan Agrobisnis dalam hal perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan di Kecamatan ini, dengan kemampuan daya tampung kecamatan Sape yang juga mencakup beberapa kecamatan yang berdekatan dengan Kecamatan Sape, seperti Kecamatan Lambu, Wera dan terdapatnya jalan lingkar dari Sape ke Bima Bagian Selatan, menjadikan kecamatan Sape di rencanakan sebagai kawasan Strategis Provinsi dalam hal Industri, pertanian, dan perikanan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, 2016

**GAMBAR 1.**  
**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SAPE**

## ANALISIS ALTERNATIF BENTUK PENGEMBANGAN KECAMATAN SAPE

### Analisis Kriteria Alternatif

#### Analisis Kriteria Pemekaran Wilayah

Ada beberapa syarat atau kriteria yang harus di perhatikan di semua alternatif yang telah ditentukan. Setelah dilakukannya analisis kriteria berdasarkan ketiga alternatif sebelumnya, di dapatkan ada beberapa kriteria dari ketiga alternatif terpenuhi dan ada juga yang tidak.

**TABEL I.**  
**PENILAIAN KRITERIA ALTERNATIF KECAMATAN SAPE**

No	Kriteria Alternatif	Penilaian Kriteria Alternatif				Keterangan
		Tidak Terpenuhi	Cukup Terpenuhi	Terpenuhi	Sangat Terpenuhi	
1	Pemekaran wilayah					
	Kependudukan				√	
	Kemampuan ekonomi		√			*untuk kemampuan ekonomu Kabupaten terhadap Provinsi
	Potensi Daerah			√		
	Kemampuan Keuangan			√		*dihitung dari penerimaan pajak
2	Pusat Pertumbuhan					
	Analisis Skalogram			√		
	Analisis LQ		√			
3	Kawasan Strategis					
	Dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan	√				
	Dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi				√	
	Dari sudut kepentingan sosial dan budaya			√		

No	Kriteria Alternatif	Penilaian Kriteria Alternatif				Keterangan
		Tidak Terpenuhi	Cukup Terpenuhi	Terpenuhi	Sangat Terpenuhi	
	Dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	√				
	Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		√			

Sumber : Analisis, 2016

### Analisis Proses Hirarki Analitik (AHP)

Berdasarkan input hasil kuesioner yg telah diberikan kepada narasumber terpilih melalui perhitungan *pairwise comparison*.. Hasil perhitungan *pairwise comparison* tersebut sebagai berikut :

**TABEL II**  
**PERHITUNGAN NILAI KONSISTENSI**

N O	Kode Narasumber	Nilai VP			Nilai Inkonsistensi
		Pemekaran	Pusat Pertumbuhan	Kawasan strategis	
1	B1	0,103	0,545	0,3	0,21
2	B2	0,124	0,715	0,161	0,2
3	B3	0,230	0,642	0,129	0,21
4	B4	0,063	0,184	0,753	0,39
5	B5	0,600	0,304	0,096	0,3
6	B6	0,119	0,573	0,308	0,19
7	B7	0,082	0,314	0,604	0,19
8	B8	0,134	0,271	0,594	0,18
9	B9	0,429	0,231	0,34	0,21
10	B10	0,575	0,196	0,228	0,3
11	B11	0,310	0,452	0,238	0,04
12	B12	0,752	0,167	0,081	0,31
13	B13	0,764	0,152	0,084	0,24
14	B14	0,668	0,209	0,122	0,32
15	B15	0,070	0,158	0,766	0,2
16	B16	0,187	0,674	0,139	0,28
17	B17	0,773	0,102	0,125	0,2
18	B18	0,622	0,169	0,159	0,28
19	B19	0,648	0,103	0,247	0,25
20	B20	0,754	0,161	0,085	0,23
21	B21	0,339	0,079	0,583	0,17

NO	Kode Narasumber	Nilai VP			Nilai Inkonsistensi
		Pemekaran	Pusat Pertumbuhan	Kawasan strategis	
	Rata-Rata	0,397	0,305	0,292	0,23

Sumber : Analisis 2016

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan menggunakan AHP, didapatkan bahwa secara keseluruhan tidak ada nilai inkonsistensi yang bernilai 1 atau lebih. Nilai inkonsistensi tertinggi dimiliki oleh narasumber dengan kode B4 sebesar 0,39. Hal ini dianggap wajar karena masih belum mendekati angka 1, sedangkan untuk nilai inkonsistensi terendah adalah narasumber berkode B11 yaitu dengan nilai 0,04. Dari nilai inkonsistensi yang didapatkan secara keseluruhan dapat dilakukan perhitungan rata-rata inkonsistensi. Rata-rata nilai inkonsistensi adalah sebesar, 0,23 dengan kata lain dari hasil inkonsistensi diatas menandakan narasumber konsisten karena nilai inkonsistensinya masih masuk 0,2.

### Analisis Kriteria Pengembangan Wilayah

Berdasarkan hasil kuesioner yang menjadi kriteria utama dalam suatu pengembangan wilayah, dari 21 narasumber ada 10 narasumber yang memilih kriteria di bidang kemasyarakatan. Kriteria prioritas utama yang dipilih oleh narasumber adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang, Hal ini menurut narasumber disebabkan karena keinginan masyarakatnya yang besar untuk membentuk kabupaten baru.

### Analisis Alternatif Bentuk Pengembangan Kecamatan Sape

Tiga alternatif bentuk pengembangan kecamatan Sape mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing jika diterapkan di wilayah studi. Seperti pada interaksi pertama, dilihat dari kriteria atau syarat teknisnya, Kecamatan Sape sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis ekonomi, namun seperti yang telah di kemukakan sebelumnya, bahwa hasil interaksi pertama bukan sebuah keputusan yang mutlak karena masih ada analisis yang digunakan yaitu analisis hirarki proses yang menampung semua pendapat narasumber terpilih, dan dari kedua interaksi ini di komperasi. Setelah dikomperasi dengan dukungan hasil perhitungan AHP, nilai perbandingan yang menunjukkan angka terbesar adalah alternatif terpilih sehingga alternatif terpilih pada kasus pengembangan wilayah di kecamatan Sape adalah *“Kecamatan Sape di mekarkan menjadi Kabupaten Baru”*.

Dalam penentuan prioritas alternatif bentuk pengembangan Kecamatan Sape berdasarkan pendapat para narasumber terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber. Namun, narasumber tersebut sebagian besar memprioritaskan adanya atau kabupaten baru. Hal ini didasarkan pertimbangan antara lain, jarak antara Bima bagian timur dengan Ibu kota Kabupaten yang baru di Kecamatan Woha cukup jauh sehingga untuk keperluan yang mengharuskan ke pusat kota akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, pertimbangan yang paling mendasar adalah

kekhawatiran masyarakat di Bima bagian timur khususnya Kecamatan Sape terhadap ketimpangan yang akan terjadi terkait perpindahan ibu kota pemerintahan ke Barat Selain hal-hal yang tersebut diatas, ada hal yang sangat diperhitungkan dalam hal pemekaran wilayah ini yaitu munculnya Issue moratorium yang menyatakan bahwa



pemerintah pusat untuk saat ini tidak akan mengambil keputusan untuk pemekaran daerah baru lagi.

Akan tetapi meskipun hambatan moratorium cukup besar dampaknya, tidak menutup kemungkinan pemekaran itu ada, karena kebijakan pasti dari waktu ke waktu akan berubah. Maka dari itu jika dilihat dari kondisi saat ini, kecamatan Sape dan sekitarnya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi DOB. Dengan pembangunan infrastruktur, pembuatan peraturan terkait Rencana Detail sebagai wilayah perkotaan, semuanya tengah di lakukan.

Alasan lainnya yang dilihat oleh narasumber adalah dari segi faktor eksternalnya. Yaitu, faktor tidak berkembangnya Sape layaknya kota Labuan Bajo. Jika dilihat dari faktor potensi, kota Labuan Bajo masih lebih sedikit potensinya dibandingkan dengan Sape. Kota Labuan Bajo hanya mengandalkan sektor pariwisatanya dalam mengembangkan daerahnya. Berbeda dengan Sape yang memiliki banyak sekali potensi yang layak di kembangkan.

### Analisis Pusat Pertumbuhan dan Cakupan Wilayah

Karena hasil analisis alternatif menunjukkan Kecamatan Sape dijadikan sebagai ibukota kabupaten baru, maka untuk regionalisasi dan nodalitas wilayah dilihat dari kawasan yang mencakupi daerah kecamatan Sape sendiri dan wilayah terdekat dengan Kecamatan Sape. Regionalisasi dari wilayah calon Kabupaten baru dapat dilihat dari aspek homogenitas dan aspek nodalitas dan administratif.

Jika dilihat dari ketiga aspek diatas, maka dapat di overlay dari ke 6 Kecamatan (minus Kecamatan Sape) yang masuk dalam cakupan wilayah DOB adalah (dapat dilihat dalam tabel):

**TABEL III.**  
**OVERLAY KETIGA ASPEK CAKUPAN WILAYAH**

No	Kecamatan	Aspek		
		Homogenitas	Administrasi	Nodalitas
1.	Ambalawi	v	v	v
2.	Lambitu	v	v	-
3.	Lambu	v	v	v
4.	Langgudu	v	v	v
5.	Wawo	v	v	v
6.	Wera	v	v	v

Sumber : Analisis Pribadi, 2016

Dengan melihat hasil serta mempertimbangkan dapat disimpulkan, dari ke 6 kecamatan yang direncanakan untuk menjadi kecamatan yang masuk dalam cakupan wilayah DOB, hanya 5 Kecamatan yang bisa dikatakan layak untuk di masukan dalam cakupan wilayah DOB yaitu Kecamatan Ambalawi, Lambitu, Lambu, Langgudu, Wawo dan Wera. Sedangkan Kecamatan Lambitu disarankan untuk tidak dimasukan dalam cakupan wilayah karena terkait jarak dan jaringan transportasi (dapat di lihat dalam peta cakupan wilayah DOB ).

### Penentuan Pusat Pemerintahan

Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan ibukota suatu daerah menurut Mariana (dalam Harefa, 2013), diantaranya adalah :

1. Faktor kemampuan pelayanan fasilitas publik,
2. Faktor kemudahan aksesibilitas dan transportasi,
3. Faktor perkembangan ekonomi, sosial, budaya,
4. Faktor daya dukung lahan,
5. Faktor potensi bencana alam pada wilayah calon ibukota.

Berkaitan dengan kriteria diatas, dan dengan melihat beberapa lokasi alternatif Ibukota yang masuk katergori wilayah Bima bagian timur, diantaranya Sape, Lambu, Wawo, Wera, Ambalawi, dan Langgudu, hasil analisis penentuan ibukota dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**TABEL IV.  
KRITERIA IBUKOTA**

Kriteria	Sape	Lambu	Wawo	Wera	Ambalawi	Langgudu
<b>Pusat Pertumbuhan</b>	√√√√ √	√√√	√	√	√	√√
<b>Fasilitas Pelayanan Publik</b>	√√√√ √	√√	√	√	√	√
<b>Aksesibilitas</b>	√√√√	√√√	√√√	√√	√√	√√√
<b>Daya dukung lahan</b>	√√√√	√√√√	√√	√√	√√√	√√√
<b>Bencana alam</b>	√√√	√√√	√√	√√√	√√√	√√√
<b>Lahan non produktif</b>	√√√	√√√√	√√	√√√	√√√√	√√√
<b>Iklim</b>	√√	√√	√√√	√√	√√	√√√
<b>Perkembangan sosial ekonomi budaya</b>	√√√√ √	√√√√	√√√√	√√√	√√√	√√√

Sumber : Analisis 2016

Mengacu pada tabel diatas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Kecamatan Sape layak menjadi bakal calon lokasi ibu kota nantinya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang masuk di wilayah Bima bagian timur. Dari smeua kriteria, Kecamatan Sape memenuhi persyaratan sebagai calon ibukota.

### Arahan Kesiapan Sebagai Daerah Otonomi Baru ( Implikasi dari Penentuan Alternative)

Ada beberapa aspek yang dipersiapkan dipertimbangkan didalam mempersiapkan suatu daerah, yaitu :

- a. Kependudukan
- b. Lahan
- c. Infrastruktur fisik
- d. Kapasitas ekonomi : Sumberdaya Alam dan Sektor Unggulan
- e. Kelembagaan dan SDM Pemerintahan
- f. Manajemen konflik & demokrasi
- g. Kapasitas Sosial Budidaya dan Politik

Syarat kelayakan pembentukan kabupaten baru berdasarkan hasil analisis aspek diatas, dapat diringkas didalam tabel 4.3 berikut ini:

**TABEL V.**  
**SYARAT KELAYAKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN**

Kapasitas	Penilaian	Keterangan
Lahan	Mampu	Siap
Kependudukan	Memadai	Siap
Infrastruktur Fisik	Cukup	Cukup
Ekonomi	Cukup	Cukup
Sosial Budaya dan Politik	Siap	Siap
Kelembagaan dan SDM Pemerintah	Cukup	Cukup
Manajemen Konflik dan Demokrasi	Siap	Siap
Sumber Daya Alam	Mampu	Mampu

Sumber : Analisis 2016 ( Lampiran)

## KESIMPULAN

Alternatif terpilih sesuai dengan analisis yang dilakukan adalah Kecamatan Sape dikembangkan sebagai Ibukota Kabupaten daerah otonomi baru (DOB). Sesuai dengan Teori sektor yang merupakan teori yang diadopsi dari Fisher dan Clark Kemampuan Kecamatan Sape terkait sektor primer terutama, bahwa sape memiliki potensi yang besar dalam hal pertanian, kehutanan dan terutama di sektor primer perikanan. Sama halnya dengan potensi dari sektor sekundernya Kecamatan Sape dengan letak geografisnya yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa, membuat Sape menjadi pintu gerbang transportasi dari dan ke timur Indonesia, dengan keberadaan Pelabuhan penyeberangan Sape sebagai pusatnya.

Teori yang terkait juga dikemukakan oleh Hoover dan Giarratani (yang menyatakan bahwa ada tiga pilar dalam proses pembangunan, yaitu; keunggulan komparatif, aglomerasi dan biaya transport. Dengan posisi Kabupaten Bima bagian timur dan barat yang di tengah-tengahnya adalah wilayah pemerintahan Kota Bima, mengakibatkan jangkauan pelayanan semakin jauh dan biaya transport semakin meningkat, sehingga proses aglomerasi akan terjadi dengan sendirinya.

Dari kedua teori diatas, alternatif Kecamatan Sape dapat dijadikan sebagai titik pusat DOB sudah cukup sesuai dengan melihat kondisi saat sekarang dan kedepannya. Berdasarkan dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas fisik, serta kemampuan ekonomi wilayah di bantu dengan kesiapan dari segi aksesibilitas yang sudah sebagian baik, keberadaan pelabuhan laut.

## REKOMENDASI

Bentuk pengembangan Kecamatan Sape dan sekitarnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima adalah :

- Meningkatkan hubungan antara wilayah inti yang dimana adalah Kecamatan Sape dengan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah cakupan. agar bisa terciptanya pembangunan wilayah yang ideal di wilayah secara keseluruhan.
- Pengembangan jaringan prasarana fisik berupa pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan antara pusat kota dengan wilayah-wilayah pengembangan bahkan Kabupaten lainnya.
- Menentukan prioritas pengembangan yang akan dilakukan, salah satunya menentukan titik-titik potensi yang akan dikembangkan serta prioritas pengembangan yang akan dilakukan pada titik-titik pusat pertumbuhan.
- Mengupayakan terciptanya kegiatan yang lebih sesuai dengan potensi ekonomi lokal dengan tetap mempertimbangkan kondisi fisik dan ekonomi tiap wilayah.
- Sangat perlu untuk memperhatikan fasilitas penunjang berupa fasilitas fisik seperti sarana pendidikan, kesehatan, tenaga ahli, pengembangan SDM dan jaringan informasi yang nantinya digunakan untuk mengakases informasi keluar mengenai potensi daerah serta menyerap informasi dari luar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep Dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- BAPPEDA. 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
- Bappenas. & UNDP 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007* buku ini diterbitkan oleh Bridge (*Building And Reinventing Decentralised Governance*). Diakses 9 maret 2015.
- Casey j. Dawkins, 2003. *Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, And Recent Developments*, *journal of planning literature*. Vol.18, No.2. Doi: 10.1177/0885412203254706 Copyright © 2003 By Sage Publication. Diakses pada tanggal 9 maret 2015
- Dedi, Masykur Riyadi. 2000. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*. Disampaikan pada acara diseminasi dan diskusi program-program pengembangan wilayah dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, hotel novotel, bogor, 15-16 mei 2000.
- Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah. 2003. *Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Di Indonesia : Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, makalah ini disajikan dalam studium general sekolah tinggi teknologi nasional (sttnas) di yogyakarta, 1 september 2003.
- Harefa, Simson. 2013. *Kajian Bentuk Pengembangan Wilayah Kurima Kabupaten Yahukimo*. Tugas Akhir tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang
- Lay, cornelis. 2001 *Otonomi Daerah Dan Keindonesiaan*. Dalam Jurnal ISP; Otonomi Lokal Dan Keindonesiaan. Yoyakarta : Gadjah Mada University Press

Parr, John B. 1999. *Growth Pole Strategies In Regional Economic Planning : A Retrospective View*. Carfax Publishing.

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007. Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima

Riyadi, Dodi. Slamet. 2002. *Dampak Globalisasi Ekonomi Dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah Di Indonesia Dalam Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep Dan Pengembangan*. Jakarta : Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Bppta

Saaty, t. Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks*. Jakarta : Pustaka binama pressindo.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.